

BAB II

DINAMIKA ISU COMFORT WOMEN HINGGA MUNCULNYA PERGERAKAN REDRESS MOVEMENT FOR COMFORT WOMEN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai dinamika isu *Comfort Women* hingga upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan isu ini, termasuk pergerakan *Redress Movement for Comfort Women* yang tersebar di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Jerman. Penulis akan menjelaskan mengenai Sejarah Isu Comfort Women, Dampak hubungan Korea Selatan-Jepang karena isu Comfort Women, Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan baik oleh negara sebagai aktor, ataupun aktor non negara termasuk pergerakan Redress Movement for Comfort Women yang tersebar di negara Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Jerman.

2.1. SEJARAH ISU COMFORT WOMEN

Comfort Women atau juga disebut sebagai *Jugun Ianfu* dalam bahasa Jepang, *Ilbonkun Wianbu* dalam bahasa Korea merupakan para wanita yang direkrut secara paksa untuk menjadi budak seksual militer Jepang (Tanaka, 2018: 1228–1229). *Ilbonkun Wianbu* merupakan panggilan resmi Comfort Women dalam bahasa Korea, yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai *Comfort Women for The Japanese Troops* (Soh, 1996: 1229). Isu *Comfort Women* dimulai sejak Perang Dunia Kedua, utamanya ketika Jepang banyak menaklukkan wilayah negara-negara di Asia. Jepang mulai melakukan intervensi politik domestik Korea sejak tahun 1868, sedangkan intervensi politik luar negeri Korea pada tahun 1904. Jepang juga melakukan perang Cina-Jepang (*Sino-Japanese War* 1894) dan Rusia-Jepang (*Russo-Japan War* 1905) untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan di Korea (Tanaka, 2018: 72). Atas kemenangan Jepang terhadap dua perang tersebut, pada tahun 1910 kedaulatan Korea jatuh di tangan Jepang sebagai koloni, melalui *Japan-Korea Annexation Treaty* (Tanaka, 2002: 33–34). Jepang menjajah Korea sejak tahun 1910 hingga 1945, sehingga jumlah Comfort Women yang berasal dari Korea mencapai 80% dari seluruh jumlah Comfort Women yang

ada. Diperkirakan korban Comfort Women yang berasal dari Korea mencapai 200.000 jiwa (Min, P. G., 2003: 938).

Seorang wakil kepala staff militer Jepang yang bernama Okamura Teiji, mendirikan rumah bordil atau disebut juga *Comfort Stations* pertama kali di Shanghai pada tahun 1932 dengan bertujuan untuk mengalihkan isu pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang (Tanaka, 2018: 94). Pendirian tersebut diminta atas komando jendral militer angkatan laut Jepang bernama Shirakawa Yoshinori (Tanaka, 2002: 20). *Comfort Stations* juga dijadikan sebagai tempat perekrutan para wanita untuk bekerja di rumah bordil tersebut. Setelah Shanghai, Jepang juga mendirikan *Comfort Stations* di negara jajahan Jepang lainnya seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Jepang, Korea, Taiwan (Min, P. G., 2003: 938–957). Keseluruhan jumlah *Comfort Stations* mencapai 400 *stations*, yang tersebar di Cina Utara sebanyak 100 *stations*, Cina Selatan 40 *stations*, Asia Tenggara sebanyak 100 *stations*, 10 *stations* di negara kepulauan pasifik seperti Vanuatu, Fiji, Tuvalu, Tonga, dan 10 *station* di Sakhalin Selatan (Tanaka, 2002: 27).

Dengan jumlah *comfort stations* tersebut, Jumlah ‘*Comfort Women*’ diperkirakan mencapai 200.000 jiwa yang tersebar di beberapa negara Asia yakni, di Korea, Taiwan, Filipina, Indonesia, Burma, dan Thailand (Soh, 1996: 1226–1227). Sedangkan Lee & Crowee (2015: 339), menyebutkan bahwa keseluruhan jumlah *Comfort Women* dapat mencapai 400.000 jiwa, termasuk *Comfort Women* yang ada di China. Terdapat tiga jenis *comfort stations*, 1) *Comfort Stations* yang dijalankan langsung oleh Jepang; 2) *Comfort Stations* yang terlihat milik pribadi, namun pada realitanya dijalankan oleh militer Jepang dan pendiriannya diperuntukan bagi militer Jepang; 3) *Comfort Stations* bersifat pribadi milik warga sipil, namun beroperasi atas ijin dan perjanjian dengan militer Jepang untuk menyediakan layanan khusus militer. Diantara tiga jenis *Comfort Station* tersebut, jenis nomor dua yang paling umum ditemui (Tanaka, 2018: 95).

Keadaan *Comfort Station* berbeda-beda di setiap daerah, bergantung pada dimana letak *Comfort Station* tersebut didirikan. Keadaan *Comfort Stations* yang

ada di Filipina dalam satu area dengan barak militer Jepang, sehingga dapat dijaga selama 24 jam. Setiap 10 wanita yang berada di Comfort Stations yang terletak di Filipin, dikurung di unit ruangan seperti sel tahanan yang cukup kecil (Tanaka, 2002: 49). Keadaan Comfort Station yang terletak di pedesaan, para wanita hanya mandi tiga kali dalam satu bulan dan harus dibawa ketempat pemandian yang terletak cukup jauh dari Comfort Station, karena sulitnya untuk mendapat akses air bersih dan sistem pembuangan yang tidak baik. Di Comfort Station pedesaan tersebut, biasanya hanya menyediakan air di mangkuk atau ember kecil, dan tempat kecil untuk buang air besar (Qiu et al., 2013: 61). Keadaan Comfort Station yang berada di kota, memiliki tempat pemandian didalam gedung Comfort Station. Pemandian di Comfort Station di desain secara terbuka tanpa adanya pintu atau sekat dan dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga para tentara bisa melihat dan mengawasi para Comfort Women ketika membersihkan diri (Henson, 2017: 38).

Keadaan Comfort Women di Comfort Station sangat menyedihkan. Para comfort women, di periksa setiap seminggu sekali untuk mengetahui apakah terdapat penyakit kelamin menular (Qiu et al., 2013: 24). Pemeriksaan merupakan fasilitas penting yang disediakan militer Jepang untuk mendukung keperluan seksual militer Jepang, dianggap penting agar dapat melindungi kekuatan militer Jepang, melindungi moral militer dan menghindari penyakit kelamin. Dalam sehari, Comfort Women harus melayani para tentara Jepang sebanyak dua puluh kali hingga tiga puluh kali sehari, sehingga menyebabkan memar dan infeksi pada bagian kelamin korban (Henson, 2017: 39). Comfort Women memiliki hari libur ketika sedang mengalami menstruasi, namun beberapa diantaranya terpaksa tetap melakukan prostitusi (Henson, 2017: 37). Para Comfort Women juga mendapat pemukulan, pembakaran, penyiksaan dan penusukan. Beberapa wanita meninggal di Comfort Stations yang dikarenakan adanya penyakit kelamin, melakukan percobaan bunuh diri dan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Banyak korban yang berusaha untuk melarikan diri, melakukan upaya bunuh diri bahkan hingga ada yang harus dimasukkan ke rumah sakit kejiwaan (Min, P. G., 2003: 941).

Jepang memberikan perilaku ke Comfort Women Filipin dengan cara yang kejam, para korban comfort women diculik, dikurung dan diperkosa di gedung rumah sakit, dimana sebelumnya mereka dijanjikan untuk bekerja sebagai perawat, wanita direkrut secara paksa dimulai dari umur lima belas tahun, bahkan beberapa diantaranya belum mendapatkan menstruasi (Henson, 2017).. Perilaku tentara Jepang terhadap Comfort Women Filipin dan China dianggap lebih ketat dan brutal dari pada yang lain, karena dari awal kedatangan Jepang, masyarakatnya sudah melakukan upaya-upaya konfrontasi. Di Indonesia, prostitusi dan perbudakan sudah dijalankan oleh pemerintah Belanda, memberikan kekhawatiran bagi tentara Jepang untuk tertular penyakit kelamin, sehingga dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis Jepang. Berbeda dengan Belanda yang membuat kontrak legalitas bagi para wanita prostitutnya, Jepang tidak memperdulikan hal tersebut (Tanaka, 2002: 61–66). Dalam beberapa kasus, Jepang membuat kontrak perjanjian yang mengatakan bahwa para wanita melakukan secara suka rela, dilakukan secara paksa dan penuh ancaman (Tanaka, 2002: 74). Dalam merekrut Comfort Women, Jepang melakukan dengan cara yang menyimpang.

Perekrutan *Comfort Women* yang dilakukan oleh Jepang, menggunakan strategi yang tipu daya dan secara paksa. Terkadang, tentara Jepang membawa senjata bermesin untuk menakuti dan menggiring masyarakat, khususnya wanita, untuk berkumpul dilapangan yang lebih besar, kemudian diberikan kekerasan seksual hingga direkrut menjadi comfort women. Para wanita yang menolak, maka wanita tersebut dan keluarganya diancam akan disiksa dan dibunuh oleh Jepang (Tanaka, 2018: 74) Comfort Women dari Taiwan, direkrut Jepang dengan cara menawarkan dan menjanjikan untuk memberikan pekerjaan yang dibayar, untuk para wanita Taiwan. Menurut kesaksian korban, terdapat agen tenaga kerja (*labour broker*) yang menawari wanita miskin untuk dapat melakukan pekerjaan domestik seperti pelayan, mencuci pakaian, memberihkan tempat, hingga bekerja di pabrik, dengan jaminan mendapatkan gaji yang tinggi (Tanaka, 2018: 43–44). Comfort Women di Filipina, diculik oleh tentara Jepang pada saat operasi

pemberishan gerilya, saat wanita berada di jalan, bekerja atau di rumah (Tanaka, 2002: 47). Di China, Para wanita diserang dan diperkosa dirumah mereka sendiri, bahkan disaksikan anggota keluarga.

Merekrut Comfort Women di Indonesia dianggap lebih mudah karena Indonesia menganggap Jepang merupakan pahlawan yang membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, serta budak seksual militer Belanda diambil alih oleh Jepang. Pandangan Jepang dimata Indonesia berpengaruh terhadap strategi yang dilakukan untuk merekrut para Comfort Women, para perempuan yang miskin dan kaya ditawarkan untuk bersekolah di Jepang (Tanaka, 2002: 82). Di Korea, banyak wanita yang masih muda dan belum menikah direkrut secara paksa untuk menjadi Comfort Women melalui organisasi yang dibentuk Jepang bernama *Women's Voluntary Labor Service Corps* atau dikenal dengan nama *Chongsindae* (Soh, 1996: 1227). Beberapa wanita dibeli dari keluarga yang miskin, keluarga yang memiliki hutang, pemilik rumah bordil yang memiliki hutang, sebagai gantinya harus menyerahkan putrinya atau wanitanya untuk bekerja prostitusi dibawah perintah Jepang. Wanita yang berumur 19 hingga 31 akan dibayar 300 hingga 1,000 yen (Tanaka, 2018: 42). Comfort Women Korea banyak di rekrut dari daerah pedesaan, seperti pedesaan di provinsi Kyongsang dan Cholla. Wanita yang direkrut berumur 12 tahun hingga 40 tahun (Tanaka, 2002: 38–41). Jepang juga bekerja sama dengan polisi sekitar untuk mendapatkan Comfort Women, pada tahun 1943 terdapat 140.000 jiwa dimobilisasi Jepang, dan beberapa diantaranya bekerja di pabrik-pabrik yang berada di Jepang selama 12 bulan (Tanaka, 2002: 40–41). Namun pada akhirnya semua wanita tersebut menjadi budak seksual tentara Jepang dan berakhir di *Comfort Stations* (Suzuki, Shogo, 2011: 226).

Terdapat dua metode yang digunakan dalam sistem perekrutan dalam Comfort Women. Pertama, menggunakan pihak ketiga yang dimulai pada tahun 1938, para Militer Jepang melakukan seleksi dan mengontrol agen yang merekrut Comfort Women sebagai pihak ketiga. Beberapa 'agen rekrutmen' yang dibentuk dan ditunjuk langsung oleh Tentara Militer Jepang. Mayoritas agen rekrutmen

merupakan pemilik rumah bordil milik pribadi dari China dan Korea yang saling bekerja sama untuk merekrut Comfort Women dari Korea, kemudian dikirim ke China dan negara lain. Para agen juga bekerja sama dengan sub-agen yang merupakan para agen tenaga kerja dan pemilik rumah bordil yang kecil, untuk merekrut para wanita dari pedesaan secara paksa atau dengan tipu daya. Dalam satu waktu dan satu tempat, para sub agen dapat merekrut 40 hingga 50 wanita (Tanaka, 2002: 38). Metode kedua, langsung merekrut para wanita di negara yang dijajah Jepang menggunakan tipu daya dan paksaan (Tanaka, 2002: 22–23).

Peresmian sistem perekrutan Comfort Women baru dilegalkan pada tahun 1942. Peresmian tersebut menjadi alasan bagi Jepang untuk menolak pernyataan adanya pemaksaan dalam merekrut Comfort Women, hingga akhirnya mengaku pada tahun 1993 (Soh, 1996: 1228). Sebelum tahun 1942 perekrutan sistem Comfort Women bersifat ilegal, meski sudah dijalankan sejak lama. Regulasi perekrutan Comfort Women yang tersusun secara terorganisir dibuat oleh militer Jepang pada 6 Maret 1939 dengan beberapa ketentuan (Qiu et al., 2013: 59). Terdapat beberapa poin ketentuan dalam regulasi perekrutan Comfort Women. Comfort Women yang khusus diperuntukan bagi komisariat harus diperiksa setiap lima hari sekali untuk mengetahui adanya penyakit kelamin, yang diperiksa langsung oleh petugas medis komisariat militer. Para wanita yang tidak lolos pemeriksaan medis harus menerima perawatan medis khusus dan tidak diperbolehkan melakukan pelayanan tanpa ijin. Setiap pemeriksaan dan hasil pemeriksaan harus dicatat untuk dilakukan inspeksi lebih lanjut. Jadwal operasi Comfort Station, dibagi menjadi dua yakni jadwal operasi untuk Tentara (*soldiers*) Jam 10 pagi hingga jam 6 Sore dan Jam 10 pagi hingga jam 9 malam untuk Petugas (*Officers*).

Tingkat jabatan militer menentukan jumlah biaya pembayaran jasa Comfort Women. Tentara (*Soldiers*), membayar 1 yen untuk setiap 30 menit, menambah 50 sen untuk tambahan waktu setiap 30 menit. Untuk perwira (*Commissioned Officers*), membayar 3 yen untuk setiap satu jam, menambah 2 yen untuk tambahan waktu setiap 1 jam. Untuk pejabat tinggi (*High Ranking*

Officials), Membayar 3 yen untuk setiap satu jam. Pekerja administrasi (*Clerical Staff Officials*), harus membayar 1.5 yen untuk setiap 30 menit, tambahan biaya yang sama untuk tambahan waktu 30 menit. Setiap klien yang menggunakan jasa pelayanan di Comfort Station militer Jepang, harus membayar, menggunakan kondom, dan membersihkan diri dikamar kecil setelahnya. Comfort Station khusus militer Jepang, diperuntukan hanya untuk personel militer dan staff pendukung militer, sedangkan orang lain dilarang masuk. Tidak diperbolehkan untuk membawa zat atau minuman beralkohol didalam Comfort Station ini. Orang sedang mabuk dilarang masuk kedalam Comfort Station ini. Setiap klien tidak diperbolehkan masuk ke ruangan lain, hanya diperbolehkan memasuki ruangan yang sesuai dengan tiket pembelian. Klien tidak diperbolehkan menggunakan layanan Comfort Women tanpa menggunakan kondom. Bagi yang tidak patuh terhadap regulasi dan melanggar regulasi yang ada, akan diusir dari Comfort Station.

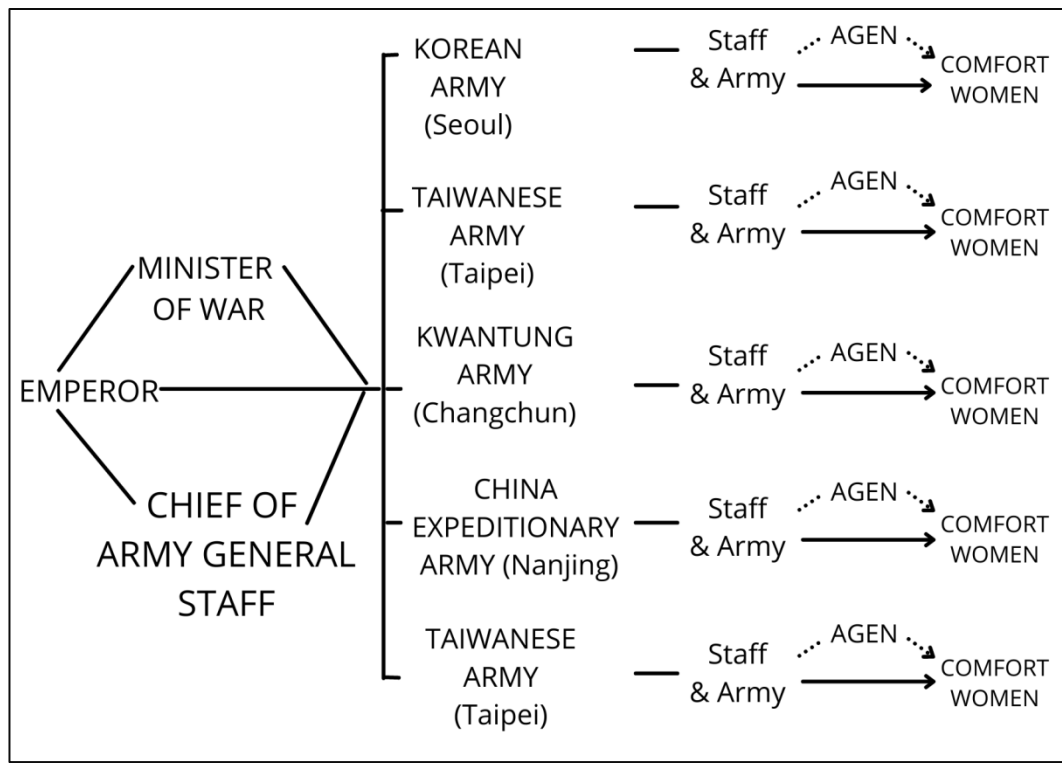
Meskipun sudah terdapat regulasi untuk membentuk sistem pelayanan dan perekrutan Comfort Women, dalam praktiknya terkadang tidak sesuai karena kurangnya pengawasan. Regulasi penggunaan kondom, tidak dijalankan dengan benar, karena kurangnya pasokan kondom. Comfort Women diharuskan mencuci dan menggunakan kembali kondom yang sudah digunakan, atau bahkan tidak menggunakannya. Akibatnya, penyakit kelamin menyebar terhadap para tentara, Comfort Women, dan wanita yang hamil (Qiu et al., 2013: 60). Uang yang dibayarkan para tentara setelah mendapatkan pelayanan, diterima dan dipakai oleh pihak yang menjalankan dan mendirikan Comfort Stations. Para Comfort Women sendiri hanya menerima 40 persen dari yang dibayarkan, bahkan beberapa tidak menerima upah tersebut (Eguchi Keiichi, 1986: 117).

Pendirian dan pelaksanaan sistem Comfort Women tidak dapat dipisahkan oleh adanya peran dari para Petinggi Jepang yang ikut serta dalam pelaksanaan Comfort Women. Terdapat tiga alasan mengapa para petinggi Jepang mendirikan dan melaksanakan sistem Comfort Women, yakni pertama, para petinggi Jepang percaya bahwa menyediakan wanita penghibur merupakan hal yang penting untuk

memberikan hiburan pada waktu luang bagi para tentara. Kedua, Memberlakukan sistem Comfort Women bertujuan untuk mengurangi pemerkosaan pada masyarakat. Ketiga, merekrut para wanita muda dan wanita yang belum menikah dengan asumsi para wanita tersebut belum pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya dengan tujuan agar tentara Jepang terhindar dari penyakit kelamin (Tanaka, 2002: 28–32).

Dengan adanya tiga alasan tersebut, menjadi motif pendirian dan pelaksanaan sistem Comfort Women yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Terdapat aktor-aktor yang merencanakan dan menjalankan sistem Comfort Women. Diketahui bahwa Menteri Perang merupakan aktor yang bertanggung jawab terhadap pembentukan sistem Comfort Women yang ada pada setiap markas tentara Jepang. Kaisar sebagai pemegang kekuasaan dan berada di struktur tertinggi juga ikut berperan dalam berlangsungnya sistem Comfort Women. Setiap aktor yang terlibat memiliki peran yang penting dalam pembuatan dan pelaksanaan system Comfort Women, yang tersusun melalui struktur organisasi. Struktur organisasi dalam sistem Comfort Women dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi dalam Sistem Comfort Women



Source : Japan's Comfort Women (Tanaka, 2002: 22)

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan mengenai struktur organisasi dalam sistem Comfort Women yang dimulai dari Kaisar yang membawahi Menteri Perang dan Kepala Jendral, Komandan Umum, Pekerja dan Tentara. Dalam struktur tersebut, menunjukkan bahwa Petinggi Jepang ikut terlibat dalam Sistem Comfort Women. Tidak hanya petinggi, pejabat sipil dan militer berpangkat terendah juga ikut serta dalam praktik sistem Comfort Women. Garis atau anak panah menggambarkan hubungan yang terjalin antar satu aktor dengan aktor lainnya. Semua aktor saling berkaitan dengan aktor lainnya secara struktural. Aktor dengan Jabatan Tinggi memiliki tugas dan peran yang berbeda, bila dibandingkan dengan Aktor dengan Jabatan yang rendah. Aktor dengan jabatan yang tinggi bertanggung jawab dalam perencanaan dan persetujuan, sedangkan aktor dengan jabatan rendah sebagai pelaksana.

Dalam gambar tersebut dapat kita lihat bahwa struktur tertinggi dipegang oleh Kaisar, yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan keputusan

kepada seluruh aktivitas militer. Keputusan tersebut akan disalurkan kepada dua bawahannya, yakni Menteri Perang (Ministry of War) dan Kepala Jendral (Chief of Army General). Menteri Perang memiliki tanggung jawab mengenai administrasi militer. Dalam praktiknya, Menteri Perang yang bertanggung jawab untuk memberikan surat perijinan penggunaan kapal militer untuk mengirim dan memindahkan Comfort Women dari suatu negara ke negara lain, termasuk surat perintah yang memberikan instruksi ke setiap markas tentara dan bagian staff untuk melaksanakan sistem Comfort Women. Kepala perwira umum (Chief of army general staff) bertanggung jawab mengenai strategi perang dan operasi militer, juga memberikan masukan dan nasihat kepada kaisar dalam merencanakan strategi perang. Menteri Perang dan Kepala Perwira Umum mengawasi dan memberikan perintah kepada setiap Komandan Umum (General Commander). Jendral Umum (General Commander) memiliki posisi tertinggi dan penanggung jawab keputusan yang ada di setiap negara yang diduduki oleh Jepang, serta memberikan perintah untuk mempersiapkan Comfort Station. Para tentara dan petugas staff akan menerima perintah dari Jendral Umum (General Commander) yang tugas dan kewajibannya dibagi menjadi dua, yakni kepada pekerja staff senior dan pekerja staff junior. Pekerja staff senior membuat rencana dalam pendirian Comfort Stations. Perwira Junior akan mengimplementasikan rencana yang telah disusun oleh Perwira Senior, mendirikan Comfort Station dan mempekerjakan para wanita. Comfort Women di berbagai negara umumnya direkrut melalui dua cara yakni melalui agen sebagai pihak ketiga dan dilakukan langsung oleh staff dan tentara militer yang melibatkan masyarakat lokal di negara yang diduduki. Garis putus-putus pada gambar, menunjukkan cara perekrutan Comfort Women yang tidak dilakukan langsung oleh tantara Jepang, namun menggunakan pihak ketiga yang berperan sebagai agen rekrutmen.

Menurut Tanaka (2002: 45) Terdapat beberapa alasan mengapa Comfort Women yang berasal dari Korea berjumlah lebih banyak dari yang lain. Pertama, penjajahan di Korea sudah berlangsung lama dari tahun 1910 hingga tahun 1945, sehingga jumlahnya lebih banyak. Kedua, beberapa wanita di negara lain seperti

di China dikhawatirkan dapat menjadi mata-mata pemerintah China untuk menumbangkan kekuatan Jepang. Prostitusi dari kalangan warga lokal China, dikhawatirkan dapat meningkatkan sentiman anti-Jepang di kalangan masyarakat China, dan membuat situasi memanas, karena sudah banyak upaya perlawanan dari masyarakat China kepada Jepang dari awal kolonialisasi dilakukan, sehingga memilih untuk mengirimkan Comfort Women dari Korea ke China. Ketiga, Antara Jepang dan Korea terdapat kesamaan Budaya dan Ideologi, karena adanya kolonialisasi yang cukup lama menghasilkan masyarakat Korea yang dapat mengerti bahasa Jepang, sehingga banyak yang menggunakan Comfort Women Korea. Keempat, adanya klasifikasi yang dalam sistem Comfort Women yang dilakukan oleh petinggi militer Jepang. Tentara kekaisaran Jepang membuat klasifikasi Comfort Women untuk menentukan siapa yang akan dilayani, yang ditentukan berdasarkan kelas, ras dan kebangsaan.

Wanita korea dan wanita yang berasal dari Asia lainnya, ditempatkan dan ditugaskan sebagai wanita kelas rendah yang harus melayani prajurit kelas bawah. Wanita Jepang dan wanita Eropa ditempatkan dan ditugaskan untuk melayani perwira tinggi atau pejabat tinggi Jepang. Kebanyakan dari wanita Eropa yang menjadi Comfort Women adalah wanita Belanda yang tinggal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yang kemudian diambil alih oleh Jepang (Watanabe, 1999: 20). Tentara Jepang juga mengirim dan menggunakan pelayanan Comfort Women yang berasal dari Jepang, namun perlakuan dan tindakan yang diberikan berbeda, dianggap lebih baik. Jepang tidak banyak memilih untuk eksploitasi Comfort Women dari Jepang, karena adanya tujuan nasional ‘Misi Nasional Keibuan’ (*The National Mission of Motherhood*), dengan mendesak wanita untuk menikah muda dan memiliki banyak anak (Soh, 1996: 1227–1228). Dengan alasan tersebut, Jepang lebih memilih Comfort Women dari negara lain, terutama Korea.

2.2. DAMPAK ISU COMFORT WOMAN TERHADAP HUBUNGAN KOREA SELATAN – JEPANG

Adanya isu Comfort Women, berdampak pada hubungan antara Jepang dengan negara-negara yang pernah diduduki, terutama hubungan Jepang dan Korea Selatan. Isu comfort women berdampak pada tiga hal, yakni perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang, berdampak pada terhambatnya *supply chain*, menimbulkan sentiment anti Jepang dan boikot yang dilakukan masyarakat.

1. Perang Dagang antara Jepang dan Korea Selatan menghambat *Supply Chain* Industri Semikonduktor

Isu Comfort Women berdampak pada Perang Dagang antara Jepang dan Korea Selatan. Keadaan Perang dagang dimulai pada tahun 2018, ketika pengadilan tinggi meminta beberapa perusahaan Jepang, salah satunya adalah Mitsubishi, untuk memberikan uang kompensasi sebesar 150 Juta Won kepada para korban perbudakan termasuk comfort women yang dipaksa bekerja tanpa dibayar, pada pabrik Mitsubishi di Nagoya pada tahun 1944 (BBC, 2019). Perusahaan yang menolak memberikan kompensasi, aset perusahaan akan disita oleh pengadilan tinggi Korea Selatan (Kajimoto & Shin, 2021). Jepang yang merasa terdesak dengan keadaan, mengambil keputusan untuk menarik beberapa perusahaan besarnya yang ada di Korea Selatan. Sebanyak 45 Perusahaan dalam bidang pakaian, elektronik dan pabrik mobil –seperti Nissan–menarik diri dari Korea Selatan semenjak Maret-November 2020 (Ryall 2021).

Perilaku Korea Selatan dikhawatirkan merugikan perusahaan-perusahaan besar Jepang, sehingga Jepang memberi balasan kepada Korea Selatan dengan mengeluarkannya dari *Whitelist* mitra dagang sejak 1 Juli 2019 (Ezell, 2020). *Whitelist* merupakan daftar negara-negara Grup A yang bermitra dagang dengan Jepang. Manfaat yang diperoleh dari anggota Grup A adalah terbebas dari seluruh prosedur ekspor untuk semua produk-produk Jepang (Junichi Sugihara, 2019). Dengan dikeluarkannya Korea Selatan dari Grup A menjadi Grup B, sehingga terdapat peraturan pembatasan ekspor terhadap 3 bahan untuk pembuatan semikonduktor, yakni *Polymides*, *Photoresist* dan *Hydrogen Fluoride*. Batasan

yang diberikan bagi negara yang berpartner dengan Jepang di Grup B adalah prosedur ekspor yang memerlukan persetujuan dari pemerintah Jepang, yang akan memakan waktu selama 90 hari kerja.

Korea Selatan membalas sikap Jepang dengan mengeluarkan Jepang dari mitra dagang dan melaporkan Tindakan Jepang ke WTO. Jepang yang semula merupakan mitra dagang Korea Selatan Grup A, diturunkan menjadi Grup A-2. Akibat dari perubahan status mitra dagang tersebut, Korea Selatan melakukan pembatasan pembelian bahan-bahan industri pembuatan senjata milik Jepang (Pham & Seo, 2019). Pada September 2019, Korea Selatan melaporkan Jepang ke WTO atas tindakan yang dianggap melanggar beberapa pasal dalam aturan GATT (General Agreements on Tarrifs and Trade) 1994 (WTO, 2019). Meninjau dari peraturan tersebut, Korea Selatan merasa dirugikan dengan adanya peraturan pembatasan ekspor yang dilakukan Jepang. Korea banyak bergantung pada Jepang dalam industri semikonduktor, karena Jepang adalah supplier terbesar dunia dalam penyediaan bahan-bahan dan perlengkapan untuk pembuatan semikonduktor. Dalam ranah global, Jepang mendominasi 90% penyediaan *Fluorinated Polyimide* dan *Photoresist*, dan 70% penyediaan *hydrogen-fluoride*. Sebagai produsen semikonduktor terbesar, Korea Selatan bergantung pada Jepang dalam penyediaan bahan-bahan pembuatan semikonduktor sebanyak 90% untuk *Fluorinated Polyimide* dan *Photoresist*, dan 44% *hydrogen-fluoride* (Oh et al., 2020: 16). Ketergantungan tersebut menyebabkan Korea Selatan akan mengalami kesulitan untuk mencari pengganti supplier bahan-bahan tersebut.

Korea Selatan merupakan satu negara industri semikonduktor terbesar bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi di dalam negeri seperti Samsung dan SK Hynix untuk memproduksi chip memori. Produk-produk semikonduktor dan Chip tersebut juga di ekspor ke perusahaan di diluar negara Korea Selatan, yang di gunakan untuk mengembangkan berbagai produk elektronik dan teknologi *artificial intelligent* (AI) yang ada pada laptop, *handphone* dan komputer (Oh et al., 2020: 15). Korea Selatan dan Jepang memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan saling bergantung, sehingga

Jepang bisa kehilangan pasar terbesarnya dan Korea Selatan bisa kehilangan supplier terbesarnya, serta kerugian yang dialami kedua negara tersebut dalam persentase ekspor-impor yang menurun. Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki peran besar dalam industri semikonduktor. Adanya perang dagang antar keduanya, yang ditandai dengan dikeluarkannya Korea Selatan dari Whitelist dan peraturan pembatasan ekspor bahan-bahan semikonduktor, berisiko pada Supply Chain antara Korea dan Jepang, serta berdampak pada lambatnya proses *Global Value Chain* dalam industri semikonduktor (Goodman et al., 2019: 24–26).

2. Sentimen Anti-Jepang dan Boikot Produk Jepang

Sejarah Kolonialisasi dan Comfort Women menimbulkan trauma dan amarah bagi para Wanita dan masyarakat di negara yang pernah diduduki oleh Jepang, sehingga menciptakan sentimen anti-Jepang. Masyarakat Korea Selatan dan China, melakukan boikot terhadap produk Jepang, sebagai bentuk sikap sentimen anti-Jepang (Vekasi & Nam, 2019). Sejak Juli 2019, ribuan warga Korea Selatan melakukan Boikot terhadap produk-produk Jepang (Kasulis, 2019). Untuk memperluas gerakan memboikot produk Jepang, masyarakat di Korea Selatan melakukan kampanye dengan membawa tulisan '*No Japan*'. Beberapa restoran dan taksi melarang turis Jepang untuk masuk ke restoran dan mobil, dengan memberikan tanda peringatan diluar restoran dan di kursi taksi. Masyarakat juga berinisiatif untuk membuat aplikasi di telefon seluler, yang dapat memberikan informasi produk-produk Jepang yang harus di Boikot. Beberapa produk Jepang yang terdampak dari kampanye boikot yakni, pakaian bermerek Uniqlo, beer dan alkohol, Honda, Toyota (Suzuki, Sotaro, 2018). Pasar Swalayan menarik beberapa produk barang konsumsi yang berasal dari Jepang (Kasulis, 2019).

Boikot yang semula merambah pada produk barang konsumsi, meluas ke ranah budaya dan pariwisata. Tiket penerbangan dan agensi wisata ke Jepang dibatalkan, sehingga adanya penurunan keuntungan dalam bisnis tersebut (Shin, M.-J. & Yu, 2019). Dalam ranah budaya, masyarakat Korea Selatan melakukan boikot pada film dan buku cerita khas Jepang seperti film *Butt Detective the*

Movie, Doraemon, Detective Conan dan *Sinchan* (Shin, M.-J. & Yu, 2019). Kampanye Boikot Jepang terus berkembang dan merambah ke berbagai ranah pekerjaan. Kampanye ‘No Japan’ ini merupakan balasan masyarakat Korea Selatan kepada Jepang saat Perang Dagang antara Jepang dan Korea Selatan yang berlangsung pada 2018-2020. Kampanye ini dilakukan sebagai bentuk kemarahan dan perlawanan masyarakat Korea Selatan atas sikap perusahaan Jepang yang menolak memberikan kompensasi.

3. Penarikan diri dari GSOMNIA

Isu Comfort Women juga membahayakan keamanan aliansi di Asia Timur (Lalitya, 2020: 645). Pada Agustus 2019, Korea Selatan mengancam akan keluar dari Perjanjian GSOMNIA (*General Security of Military Information Agreement*). Perjanjian GSOMNIA merupakan perjanjian trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang yang bekerjasama untuk saling berbagi informasi intelijen mengenai perkembangan nuklir milik Korea Utara (Cha, 2019). Ancaman yang dilakukan oleh Korea Selatan bertujuan untuk mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan Jepang, agar hubungan perdagangan dengan Jepang dapat kembali berjalan dengan baik (Xianhuanet, 2019). Melemahnya aliansi trilateral tersebut menguntungkan negara-negara yang menentang Amerika Serikat seperti China, Korea Utara dan Russia. Hal ini dibuktikan dengan Perang Dagang antara Amerika Serikat dan China (CNN Indonesia, 2020). Pada tahun 2019, terjadi ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat yang diakibatkan oleh Uji Coba Rudal yang gencar dilakukan oleh Korea Utara (CNN Indonesia, 2019). Aliansi Trilateral dalam GSOMNIA yang melemah, dikhawatirkan mengurangi pengawasan terhadap negara-negara oposisi Amerika Serikat yang dapat membahayakan kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur.

Dari tiga poin tersebut menggambarkan isu comfort women memberikan dampak hubungan Korea – Jepang yang mengalami ketegangan dalam hubungan politik dan hubungan yang saling berketergantungan dalam bidang ekonomi. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan yang

bersifat dingin dalam politik, namun hangat dalam perekonomian (Vekasi & Nam, 2019: 303).

2.3. UPAYA PENYELESAIAN ISU COMFORT WOMEN

Isu Comfort Women sudah cukup lama terjadi, sehingga memberikan dampak pada hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan, juga berdampak pada negara lain. Perselisihan yang telah terjadi cukup lama mendorong upaya untuk melakukan penyelesaian konflik terhadap isu Comfort Women. aktor Negara dan Aktor Non Negara ikut serta dalam upaya penyelesaian konflik.

2.3.1. Upaya Aktor Negara Hingga Sebelum Japan-ROK Agreement 2015

Aktor Negara yang ikut serta upaya penyelesaian konflik merupakan negara yang terlibat dalam perselisihan antara Jepang dan Korea Selatan, sehingga ikut melakukan upaya penyelesaian konflik. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meredakan konflik, yakni Perjanjian *The Basic Treaty* tahun 1965, *Kono Statement*, Pembentukan *Asian Women's Fund*, dan Perjanjian *Japan-ROK Agreement on Comfort Women* tahun 2015.

Perjanjian *The Basic Treaty* tahun 1965, dilakukan oleh Jepang dan Korea untuk memperbaiki hubungan bilateral, sebagai tanda awal mula dimulainya kembali hubungan antar kedua negara tersebut. Perjanjian ini bertujuan menyelesaikan masalah antara Jepang dan Korea pada masa perang, yang berisi 6 poin perjanjian, yakni; 1) Pembahasan mengenai hubungan diplomatik dan konsuler antara Jepang dan Korea Selatan; 2) Pembatalan semua perjanjian yang dilakukan sebelum 22 Agustus 1910, dianggap batal dan sudah tidak berlaku, termasuk perjanjian aneksasi; 3) Pengakuan bahwa pemerintah ROK adalah satu-satunya pemerintah yang diakui secara sah oleh Korea; 4) Pernyataan yang menyatakan bahwa hubungan kedua negara akan dipandu berdasarkan piagam PBB dan setuju akan bekerja sama dalam meraih kesejahteraan dan kepentingan bersama; 5) Persetujuan mengenai perjanjian komersial antar keduanya; 6) Persetujuan mengenai transportasi udara sipil.

Diskusi mengenai perjanjian ini dilakukan sejak 1951 hingga 1965 (Oda, 1967: 40–43). Ketentuan lain dalam perjanjian tersebut yakni Korea mendapat

pinjaman sebesar \$845 Juta untuk komersial dan pembangunan pemerintah, mendapatkan hibah bantuan sebesar \$300 Juta, dan klaim property sebesar \$45 juta (Cha, 1996: 127). Perjanjian *Basic Treaty 1965* gagal untuk memasukan isu Comfort Women dalam persidangan, Sehingga pemerintah Korea tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah Jepang atas isu Comfort Women (LEE & CROWE, 2015: 346). Perjanjian ini dianggap lebih banyak membahas mengenai ganti rugi perang, namun tidak benar-benar membahas pertanggung-jawaban Jepang mengenai kolonialisasi yang dilakukan oleh Jepang (Min, C., 2012).

Upaya lain yang dilakukan untuk meredakan isu yakni adanya pernyataan dari Sekretaris Kabinet Jepang, yang disebut dengan *Kono Statement*. *Kono Statement* merupakan pernyataan bersalah dan permintaan maaf yang dilakukan pemerintah Jepang, yang diwakili oleh Kepala Sekretaris Kabinet bernama Yohei Kono. Setelah ditemukannya bukti sistem Comfort Women pada tahun 1992, dengan ditemukannya berkas telegram yang berisi permintaan dari militer Jepang untuk mengirim Comfort Women Taiwan ke Borneo (Suzuki, Shogo, 2011: 226). Pada tanggal 4 Agustus 1993 Yohei kono memberikan pernyataan, Jepang mengakui bahwa pihaknya terutama militer Jepang melakukan adanya aktivitas perekrutan Comfort Women secara paksa (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014: 17–19). Disusul dengan permintaan maaf Perdana Menteri Murayama Tomiichi pada Agustus 1994, yang menyatakan penyesalan dan permintaan maaf mendalam kepada seluruh Comfort Women. Perdana Menteri Murayama juga menambahkan, bahwa pemerintah dan masyarakat Jepang akan berpartisipasi dalam sentimen Comfort Women. Pengakuan dari Kono Statement dan Perdana Menteri Murayama Tomiici, membantu mengungkap kasus yang selama hampir lima puluh tahun tidak diakui Jepang. Upaya dari kedua tokoh Jepang tersebut menghasilkan kebijakan untuk dilakukannya ‘investigasi kembali’ dan dibentuknya organisasi *Asian Women’s Fund* yang dapat membantu memberikan kompensasi bagi para korban Comfort Women (Yōko, n.d.: 58).

Asian Women’s Fund (AWF) dibentuk atas perintah Perdana Menteri Murayama Tomiici pada Juli 1995, proyek ini dipimpin oleh Hera Bunbei (Yōko,

n.d.: 58). Pemerintah Jepang juga memberikan pernyataan terkait masalah reparasi, restitusi dan hak untuk menuntut Jepang atas yang terjadi pada Perang sudah di selesaikan melalui Perjanjian *San Francisco Peace Treaty*. Menurut AWF (Asian Women's Fund, n.d.) Pemerintah Jepang menyisakan dana sebesar 480 Juta Yen untuk diberikan ke dalam projek AWF. Dana tersebut dikumpulkan dari pengumpulan sumbangan yang diminta dari masyarakat Jepang untuk ikut menunjukkan sikap prihatin seluruh masyarakat Jepang terhadap isu Comfort Women. Dana yang dikumpulkan, akan digunakan untuk menyediakan projek kesehatan, kesejahteraan dan lainnya yang berkaitan untuk para korban Comfort Women. Setelah projek ini dilaksanakan, para pemerintah berniat memberikan permintaan maaf secara tulus kepada para Comfort Women. Pemerintah juga berniat menyediakan dan menyusun data-data yang berkaitan dengan isu Comfort Women, yang kemudian akan dijadikan sebagai pelajaran sejarah.

Upaya platform Asian Women's Fund, dianggap gagal karena ditolak oleh mayoritas *Comfort Women*, NGO dan Aktivis. Penolakan bantuan ini dilakukan karena bertolak belakang dengan tuntutan mereka. Terdapat tiga alasan penolakan terkait projek AWF. Pertama, Mayoritas Comfort Women tidak menginginkan bantuan dari masyarakat luas secara suka rela, melainkan uang kompensasi yang diberikan pemerintah Jepang secara langsung (CHANG, 2009: 37). Kedua, para Korban tidak akan menerima kompensasi tanpa adanya permintaan maaf secara resmi dari negara Jepang (Henson, 2017). Hal ini dikhawatirkan bahwa pemberian uang kompensasi hanya sebagai strategi bagi Jepang untuk menghindari pernyataan permintaan maaf secara resmi. Ketiga, pengumpulan dana kompensasi yang dilakukan secara terbuka pada masyarakat luas, mengindikasikan bahwa Jepang berupaya untuk menghindar dan mengurangi beban untuk melakukan upaya pemberian kompensasi pada para Korban Comfort Women (Kim, 2020: 50–51).

Pada masa Moon Jae In, yayasan Asian Women Fund yang dibentuk oleh Jepang dibubarkan. AWF beroperasi dari 1995 hingga 2007 (Kim, 2020: 51). Pada tahun 2018, pengadilan tinggi Korea Selatan menggugat Jepang untuk memberikan uang kompensasi sebesar 91.800 US Dollar kepada setiap individu

yang menjadi korban Comfort Women. Sanksi kompensasi juga diberikan kepada perusahaan Jepang yang dianggap ikut serta di dalam bentuk eksploitasi wanita dan pekerja pabrik pada masa kolonialisasi. Uang kompensasi yang diberikan kepada buruh yang dieksploitasi di perusahaan atau pabrik, dilakukan dengan cara menjual aset yang disita dari perusahaan oleh pengadilan. Putusan pengadilan untuk menyita aset perusahaan milik Jepang yang dianggap ikut serta dalam aktivitas eksploitasi pada masa penjajahan, diisyaratkan sebagai penyebab banyaknya perusahaan Jepang yang menarik diri dari Korea Selatan.

Pada tahun 2015 Presiden Korea Selatan, Park Geun hye telah bertemu dengan perdana menteri Jepang bernama Shinzo Abe untuk melakukan upaya resolusi konflik. Upaya tersebut membuahkan kesepakatan yang bersifat '*Final and Irreversible*'. Kesepakatan "*2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women*" dengan isi perjanjian : 1) Jepang akan memberikan 1 Milyar Yen kepada para Comfort Women yang dikelola oleh Korea Selatan, 2) Pemberian dana, kemudian akan disusul oleh permintaan maaf perdana menteri Jepang, 3) permasalahan ini dianggap selesai dan bersifat '*Final & Irreversible*' oleh Korea Selatan, jika Jepang menepati Janjinya, 4) Pemerintah Korea Selatan akan memindahkan patung memorial yang berada di depan Kedutaan Jepang di Seoul, 5) Kedua pihak setuju agar tidak membahas kembali isu ini dalam komunitas internasional (BBC 2015).

Upaya bilateral pada kesepakatan *Japan-ROK Agreement on Comfort Women* tahun 2015 tidak menyelesaikan masalah, justru pergerakan *Redress Movement for Comfort Women* menyebar ke negara-negara lain. Mereka justru menentang dan menolak perjanjian 2015 tersebut, karena dianggap tidak merepresentasikan kepentingan *Comfort Women* dan menyampingkan perjuangan *Comfort Women* hanya dengan uang kompensasi yang tidak sepadan (Sang-Hun 2015). Perjanjian tersebut yang tidak sesuai dengan poin-poin yang dituntut oleh pergerakan *Redress Movement for Comfort Women*, yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya. Dengan adanya kesepakatan '*Final dan Irreversible*' pada tahun 2015, dianggap cukup efektif untuk mengurangi sentimen yang ada di

Korea Selatan, namun tidak benar-benar menyelesaikan isu yang ada (Lay 2018, 66-67). Sebaliknya, pemerintah Korea Selatan melakukan kesepakatan '*Final and Irreversible*' pada tahun 2015 dengan pemerintah Jepang karena adanya tekanan, ancaman dan desakan dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu aliansi di Asia Timur. Desakan dari Amerika Serikat terhadap Korea Selatan, dilakukan dikarenakan dapat membahayakan hubungan aliansi Amerika Serikat di Asia Timur (Lalitya 2020, 645).

2.3.2. Redress Movement for Comfort Women Sebagai Upaya Aktor non-Negara

Kolonialisasi dan isu Comfort Women yang dilakukan Jepang, mendorong perjuangan untuk mendapatkan keadilan melalui pergerakan sosial yang dilakukan oleh aktor non-negara. Pergerakan Sosial yang berupaya untuk menuntut Jepang memberikan pertanggung-jawaban dan keadilan bagi Comfort Women disebut sebagai *Redress Movement for Comfort Women* (RMCW). Pergerakan RMCW bertujuan untuk menuntut pertanggung jawaban Jepang atas kesalahan masa lalu yang dilakukannya pada masa kolonialisasi, khususnya isu *Comfort Women* (Min, P. G., 2003: 939). Pergerakan RMCW mulai terdengar pada tahun 1990. Pergerakan RMCW di Korea Selatan, dinaungi oleh NGO The Korean Council.

Pada mulanya, The Korean Council terbentuk pada November 1990 dengan nama *The Korean Council for the women drafted for Military Sexual Slavery by Japan*, atau yang lebih dikenal dengan KCWS yang didirikan oleh 36 wanita Korea yang peduli terhadap isu Comfort Women dan berupaya untuk mengambil tindakan terhadap pemerintah Jepang (Min, P. G., 2003: 941). Pada tahun 2016 didirikan NGO *The Foundation for Justice and Remembrance for The Issue of Military Sexual Slavery by Japan*, bertujuan menggalkan perjanjian Japan-ROK Agreement 2015. Di tahun 2018, dua NGO tersebut digabungkan menjadi *The Korean Council for Justice and Remembrance for the Issue of Military Sexual Slavery by Japan*, yang disingkat menjadi The Korean Council (The Korean Council, 2020a: 9).

Tugas pertama yang dikerjakan oleh KCWS di tahun 1990 yakni, wanita pendiri KCWS mengelilingi daerah untuk mencari korban yang masih hidup. Kim Hak Sun adalah salah satu korban yang masih hidup, dan korban pertama yang menyampaikan testimoni sebagai Comfort Women kepada publik pada Agustus 1991 (Luck, 2018). Kesaksian Kim Hak Sun menginspirasi para *Survivors*, sebutan Comfort Women yang masih hidup, untuk dapat melakukan memberikan testimoni serupa (P. Kim 2020, 43-44). Testimoni dari Kim Hak Sun mendorong aktor non negara untuk ikut membantu menyelesaikan isu Comfort Women dalam ranah internasional melalui Konferensi *Asian Solidarity Women* dan *Internationals Women's Tribunal*.

Aktivistis feminis dan NGO yang dari Korea Selatan, membentuk koalisi melalui konferensi '*Asian Women Solidarity Forum*' yang diikuti oleh Aktivistis Feminis dan NGO dari Jepang, Taiwan, Filipina di Seoul tahun 1995 (Soh, *The Korean "Comfort Woman" : Movement for Redress* 1996, 1237). Konferensi ini menjadi upaya penyelesaian konflik transnasional pertama kali, yang dilakukan oleh aktor non negara. Sebelumnya pada Desember 1991, *Association of Pacific War Victims and Bereaved Families* membantu Kim Hak Sun dan beberapa *Survivors* untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Jepang di Pengadilan Distrik Tokyo (Soh, 1996: 1233). Pada 1997 aktivis Comfort Women di Jepang mengadakan konferensi internasional di Tokyo yang dihadiri oleh aktivis dari 20 negara lain, sehingga menghasilkan pendirian organisasi baru di Jepang yang bernama VAWW-Net Japan (*Violence Against Women in War Network-Japan*). Hasil diskusi dari organisasi Jepang tersebut terdapat kesepakatan untuk membuat pengadilan kejahatan perang terhadap Perempuan. Desember tahun 2000, diadakan Women's Tribunal. Pemerintah Jepang ikut diundang dalam pengadilan ini, namun menolak untuk datang atau mengirim perwakilannya. Hasil persidangan dinyatakan pada Desember 2001 oleh ICJ (International Court of Justice) di Den Haag, memutuskan bahwa Kaisar dan Sembilan pejabat tinggi sipil dan militer bersalah dan harus dihukum, karena menyetujui dan membuat kebijakan Comfort Women (Kim, 2020: 52-53).

Dalam pergerakan RMCW, The Korean Council memiliki tujuh poin tuntutan kepada Jepang dan empat poin tuntutan kepada pemerintah Korea Selatan (The Korean Council, n.d.-c). Tujuh poin tuntutan yang diberikan oleh NGO KCWS terhadap Jepang, yakni: 1) Permintaan maaf secara resmi oleh pemerintah Jepang; 2) Mengakui kejahatan yang dilakukan; 3) Investigasi dan mengungkap pelaku-pelaku dibalik kejahatan; 4) Hukuman untuk para pelaku; 5) Edukasi Publik mengenai sejarah Comfort Women; 6) Hak didirikannya museum dan patung memorial; 7) Pemberian uang kompensasi legal dari pemerintah Jepang. Selain menuntut pemerintah Jepang, RMCW di Korea juga menuntut pemerintah Korea Selatan. Empat poin tuntutan yang diberikan oleh NGO The Korean Council terhadap Pemerintah Korea, yakni : 1) Pembatalan *Japan-ROK Agreement on Comfort Women* tahun 2015; 2) Pembatalan sertifikat dan pembubaran Yayasan Rekonsiliasi dan Penyembuhan yang didirikan Jepang dengan dana 1 milyar Yen; 3) Proses investigasi pencapaian perjanjian *Japan-ROK Agreement on Comfort Women* tahun 2015; 4) Memasukan isu perbudakan seksual militer Jepang kedalam kurikulum sekolah dan pendidikan sosial.

The Korean Council memiliki visi untuk menyelesaikan dan mengingat isu Comfort Women serta mendukung anti pelanggaran hak asasi perempuan lainnya. Terdapat tiga misi The Korean Council yakni, Pertama, mengawasi jalannya isu dan membangun solidaritas; Kedua, merekam, mengingat, mendidik mengenai isu Comfort Women; Ketiga, melakukan komunikasi dan memperkuat jaringan pergerakan (The Korean Council, n.d.-b).

Untuk memenuhi tujuan dan tuntutan yang diberikan ke pemerintah Korea Selatan dan Jepang, RMCW melakukan kegiatan Wednesday Demonstration. Wednesday Demonstration pertama kali dilakukan pada 8 Januari 1992, ketika Perdana Menteri Jepang yang bernama Kiichi Miyazawa, melakukan kunjungan ke Korea Selatan. Demonstrasi yang dilakukan secara Mingguan pada hari Rabu, pukul dua belas siang. Dipilih pada waktu tersebut karna merupakan pada waktu tersebut merupakan waktu yang paling ramai dan padat, sehingga banyak orang yang melihat dan bergabung (KBS World, 2014). Demonstrasi dilakukan di

depan kedutaan Jepang yang ada di Seoul dengan cara meneriakkan dan menuliskan kata-kata “Hukum!,” “Minta Maaf!,” dan “Kompensasi!” (Soh, 1996: 1235). Demonstrasi tersebut bertujuan untuk memperjuangkan perdamaian dan hak asasi manusia dalam isu peperangan dan kekerasan seksual.

Pada tahun 2011, untuk memperingati perayaan Wednesday Demonstration yang ke-1000, didirikan *Pyeonghwa-bi* atau patung perdamaian. Selain pendirian patung, jalan didepan Kedutaan Besar Jepang juga diberikan nama *Pyeonghwa-ro* yang artinya Jalan Damai, karena menjadi lokasi dilakukannya Wednesday Demonstration (The Korean Council, 2011: 7). Patung Perdamaian tersebut didirikan di depan Kedutaan besar Jepang di Seoul (Kim, 2020: 65). Patung Perdamaian yang didirikan di Korea Selatan berjumlah 144 patung. Salah satu patung didirikan didepan Kedutaan Besar Jepang, yang mengartikan pesan dalam Patung Comfort Women selalu memandang Kedutaan Jepang (The Korean Council, 2021c). Selama beberapa tahun terakhir, terdapat organisasi di negara lain yang ikut serta melakukan pergerakan *Redress Movement for Comfort Women* dengan cara ikut mendirikan Patung Perdamaian dan melakukan Wednesday Demonstration. Pergerakan tersebut terdapat di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, German, Kanada dan Australia.

2.4. Kesimpulan

Comfort Women atau Jugun Ianfu atau Ilbonkun Wianbu, merupakan sebutan bagi wanita yang direkrut secara paksa oleh militer Jepang untuk dijadikan sebagai budak seksual militer Jepang. Sejarah Comfort Women berdampingan dengan sejarah penjajahan yang dilakukan Jepang. Jepang melakukan peperangan *Sino-Japanese War* 1894 dan *Russo-Japan War* 1905 untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan di Semenanjung Korea. Setelah kemenangan dari dua perang tersebut, Korea diambil alih oleh Jepang dari tahun 1910 hingga kejatuhan Jepang ditangan sekutu pada tahun 1945. Jatuhnya kedaulatan Korea di tangan Jepang, menandakan regulasi rekrutmen comfort women didirikan dengan tujuan sebagai hiburan tantara Jepang, menghindari

pemeriksaan di masyarakat dan untuk menghindari penyakit kelamin. Sistem Comfort Women didirikan oleh para petinggi militer Jepang, sehingga perekrutan Comfort Women dan perbudakan seksual dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Perekrutan Comfort Women dilakukan menggunakan pemaksaan dan tipu daya. Sistem tersebut berdampak pada lebih banyaknya jumlah Comfort Women yang berasal dari Korea, disbanding dari negara lain.

Setelah kejatuhan Jepang ditangan sekutu, melahirkan upaya untuk mendapatkan keadilan bagi Comfort Women. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dan aktor non-negara seperti aktivis dan NGO. Upaya yang dilakukan oleh aktor non negara merupakan bagian dari pergerakan RMCW yang diaktualisasi melalui tujuh tuntutan kepada pemerintah Jepang dan empat tuntutan kepada pemerintah Korea Selatan. Pergerakan RMCW di Korea dinaungi oleh NGO The Korean Council yang memiliki program dalam pergerakan seperti Wednesday Demonstration dan pendirian patung. Permasalahan yang tak kunjung usai dan sikap Jepang yang ambigu dalam penyelesaian konflik, memberikan dampak pada hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan.